

BAB I

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam UU No.22/1999 tentang pemerintah daerah di sebutkan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - usul dan adat istiadat setempat yang di alami dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di bawah kabupaten. Di tegaskan bahwa hal - hal yang mendasar dalam UU ini adalah mampu mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas serta meningkatkan peran masyarakat.

Di tegaskan pula bahwa landasan pemikiran mengenai pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Otonomi pemerintah desa merupakan suatu kajian yang menarik di mana desa di tuntut agar mampu mengembangkan diri sendiri berdasarkan tingkat kemampuan masyarakat, strategi dan taktik dalam menangani pembangunan desa, potensi alam dan pola kehidupan masyarakat juga tingkat kemampuan masyarakat. Konsep tersebut menuju pada terciptanya kesiapan desa untuk mandiri dalam rangka mengelola kepentingan masyarakat setempat. Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa tanggung jawab birokrat di setiap level pemerintahan untuk menyikapi dan tanggap terhadap penguatan otonomi melalui kebijakan-kebijakan dan program-program pemberdayaan¹.

¹ Miftah Taha " *Bahaya Aspek Kebijakan Birokrasi?* " Media Widya Mandala, Tahun 1999, hal

Kemandirian desa sebagian besar tergantung di tangan pemerintah desa dan masyarakatnya, di mana pemerintah desa menjadi ujung tombak harus memiliki kemampuan dan kecakapan dalam rangka mengelola desanya, baik dalam hal pengelolaan terhadap masyarakat, potensi sumber daya yang dimiliki serta pengelolaan terhadap aparatur pemerintah desa yang menjalankan fungsi birokrasi di desa. Selain itu pemerintah desa harus mampu menumbuhkan kewibawaan atas pemerintahannya di mata masyarakat, karena para petani umumnya bertindak dan berpikir secara tradisional dan kurang atau tidak memahami langkah – langkah yang di tempuh oleh pemerintah pusat.

Dalam rangka pembangunan masyarakat aparatur birokrasi pemerintah desa berfungsi untuk menyematani serta melayani masyarakat dalam proses pembangunan dan harus mampu mengakomodasi serta mengimplementasikan program - program dan kebijakan - kebijakan yang sesuai dengan keinginan dan harapan dari masyarakat. Birokrasi harus tanggap terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang bersikap dinamis, sehingga jika birokrasi kurang tanggap terhadap aspirasi dan keluhan masyarakatnya jelas celaan dan keluhan akan di tujukan kepada birokrasi tersebut. Selain itu birokrasi pemerintah di tuntutan untuk memiliki sikap mental, kinerja dan kecakapan yang baik serta terbuka terhadap masyarakat agar terciptanya keserasian antara masyarakat dan pemerintah dalam pencapaian tujuan pembangunan.

Proses pembangunan senantiasa menunjukkan gejala yang meningkat, maka peran birokrasi pemerintah merupakan proses yang semakin besar dan komplitatif di mana kecenderungan arah baru dari proses pembangunan ini

menekankan dari area bawah ke atas (BOTTOM UP). Oleh karena itu birokrasi pemerintah harus mampu melihat kenyataan pembangunan jika peran yang di mainkannya bisa berhasil, yaitu dengan mengembangkan manajemen pembangunan sumber daya yang berwawasan lokal dengan menggunakan model pembangunan di mana program-program dan kebijakan-kebijakannya berasal dari bawah yakni dengan melihat sampai di-mana peran serta masyarakatnya².

Keberhasilan pelaksanaan otonomi dan pembangunan di desa tidak terlepas dari partisipasi aktif anggota masyarakat, di mana masyarakat sebagai kesatuan individu merupakan bagian integral dari sistem pemerintah desa.

Pembangunan masyarakat desa di kembangkan melalui pencapaian *understanding* atau saling pengertian antara masyarakat dengan pemerintah dan masyarakat kemudian menjadi solider terhadap usaha pemerintah yang nyata-nyata berusaha membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan terutama kebutuhan pokoknya. Keterpaduan pemerintah dan masyarakat ini adalah berbentuk usaha yang berasal dari masyarakat atas dasar ide masyarakat atau atas dasar kebijaksanaan dan strategi pemerintah. Keduanya perlu bertemu secara serasi dalam bentuk perencanaan pembangunan masyarakat desa yang di usahakan daerah-daerah³.

Keterpaduan seperti ini secara politis akan mendekatkan pemerintah dengan masyarakat dan secara sosial dan ekonomi, rencana pembangunan masyarakat desa yang di biyai pemerintah benar - benar di manfaatkan oleh masyarakat. Masyarakat mengantisipasi politik pembangunan pemerintah dan

kemudian berpartisipasi. Pembangunan masyarakat desa di tangani secara terpadu dengan memperhitungkan potensi dan permasalahan yang di hadapi wilayah yang menjadi tumpuan hidup masyarakat.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu wujud dari adanya sikap masyarakat yang mendukung pemerintah dan dapat di realisasikan dalam berbagai bentuk di setiap aspek kehidupan masyarakat. Tetapi sering kali partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat rendah dan bahkan masyarakat bersikap “tak acuh” terhadap berbagai program Pembangunan, karena adanya persaingan antara masyarakat setempat dengan masyarakat pendatang⁴.

Partisipasi masyarakat menjadi rendah di sebabkan ketidaksesuaian Program - program pembangunan dengan kebutuhan setempat dan bukan karena sifat masyarakat yang tidak ingin partisipasi. Partisipasi masyarakat juga menjadi kurang karena lemahnya kapasitas aparat lokal untuk “Menterjemahkan” pesan-pesan pembangunan pada masyarakat sesuai dengan kondisinya. Dan adanya sifat keenganan dari aparat pemerintah untuk mempelajari sistem yang lebih sesuai untuk wilayah setempat.

Pengalaman berbagai penelitian lain menunjukkan kesan bahwa aparat merasa “serba mampu” karena penguasaannya atas dana - dana pembangunan dan “kekuasaan”, sehingga cenderung kurang memperhatikan pranata - pranata sosial politik dan sosial budaya yang tumbuh dalam masyarakat. Oleh karena itu, sangat sulit untuk mengajak masyarakat ikut berpartisipasi, sebab masyarakat merasa tidak di ajak melainkan cenderung “diminta” Partisipasinya.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah bahwa peneliti ingin mengetahui “Bagaimana peran aparat pemerintah desa dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Sumbawa Besar, NTB, Tahun 2004.?”

C. KERANGKA DASAR TEORI

Untuk memberikan gambaran mengenai kajian yang akan di teliti dalam mengetahui peran aparat pemerintahan desa dalam peningkatan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa, peneliti akan mendasarkan pada tinjauan yang di gunakan sebagai acuan untuk menjelaskan fenomena yang akan di kaji atau di teliti adalah sebagai berikut :

1. Peran Birokrasi Pemerintah Desa.

Untuk menjelaskan Peran Birokrasi Pemerintah Desa maka perlu untuk mengetahui pengertian dari istilah tersebut di atas agar dapat di peroleh suatu pemahaman tentang konsep yang akan di jelaskan, adalah sebagai berikut :

1. Peranan

Peranan adalah perilaku yang di harapkan akan di lakukan oleh seseorang yang menduduki posisi tertentu. Seseorang yang menduduki

⁴ Mubandita Dkk. *Peranan Aparat Pemerintah Desa dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Sumbawa Besar, NTB, Tahun 2004.* 100

mengartikannya sebagai "Birokrasi adalah "Kekuasaan, pengaruh dari para kepala dan staf biro pemerintahan"⁸.

Konsep birokrasi mendapat arti pentingnya secara sempurna didalam teori politik Mill seperti tertera dalam *Consideration on Representative Government* (1861). Dalam memperbandingkan tipe - tipe pemerintahan, dia menegaskan bahwa di luar bentuk perwakilan, hanya bentuk birokrasilah yang memiliki keterampilan dan kemampuan politik yang tinggi, bahkan ketika dijalankan dengan nama monarki atau aristokrasi. Birokrasi adalah "Pekerjaan menjalankan pemerintahan oleh orang - orang yang pemerintah secara profesional"⁹.

Dan definisi birokrasi yang telah di rangkum dari konsep birokrasi Weber adalah "Birokrasi yang di maksud ialah suatu badan administrative tentang pejabat yang di angkat"¹⁰.

Sedangkan pemerintahan desa adalah kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat atau organisasi pemerintahan yang terendah di wilayah RI yang berdasarkan asas dekonsentrasi di bawah camat bertanggung jawab langsung kepada pemerintahan wilayah kecamatan yang bersangkutan. Struktur pemerintahan Negara kita dan merupakan sebagai satuan pemerintahan terendah yang berada langsung di bawah kecamatan sehingga merupakan tumpuan segenap pelaksanaan urusan pemerintahan baik dalam rangka desentralisasi, dekonsentrasi, maupun tugas pembantuan. Desa merupakan suatu wilayah yang di dalamnya bertempat tinggal sekelompok

masyarakat dengan norma – norma atau hukum yang di yakini oleh masyarakat yang bersangkutan. Pendapat tersebut di dukung oleh pendapat – pendapat di antaranya :

Penyebutan desa memang terasa lebih akrab di telinga suku jawa . Menurut Soetarjo Kartohadikoesoemo perkataan arti kata desa, dusun, desi, seperti juga perkataan Negara, negari, nagaro negory (nagarom), asalnya dari perkataan Sanskrit (sansekerta) yang artinya tanah air, tanah asal, tanah kelahiran¹¹,. Dalam pengertian yang lebih khusus mengenai desa, Soetarjo Kartohadikoesoemo memberi pengertian bahwa desa merupakan kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri, di tambahkan bahwa desa itu terjadi dari hanya 1 tempat kediaman sebagian dari masyarakat hukum yang terpisah yang merupakan kesatuan – kesatuan tempat tinggal sendiri¹² .

Pemerintah adalah institusi atau lembaga yang melaksanakan kegiatan pemerintahan . Pemerintahan sebagai kegiatan adalah segala kegiatan yang terorganisir yang dilakukan oleh pemerintah yang bersumber pada kedaulatan yang meliputi yuridiksi territorial dan yuridiksi personil demi tercapainya tujuan dari suatu pemerintahan . Menurut marium pemerintah merupakan organ badan yang di pimpinan dalam usaha – usaha penyelenggaraan kepentingan – kepentingan atau tujuan – tujuan secara umum atau khusus bagi masyarakat dan dijelaskan pula bahwa pemerintah itu menjalankan pemerintahan,

⁹ *Ibid*, hal 8

¹⁰ *Ibid*, hal 31

dengan batasan pemerintah adalah segala kegiatan atau usaha yang terorganisasi, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan dasar Negara untuk mencapai tujuan Negara¹³.

Bayu Suryaningrat mencoba untuk memberi batasan mengenai apa yang dimaksud dengan pemerintahan desa. Pemerintahan desa menurutnya adalah suatu kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah kecamatan yaitu pemerintah desa dan pemerintah kelurahan¹⁴.

Pemerintah desa sebagai lembaga eksekutif terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa mempunyai kewajiban untuk menjalankan dan menyelenggarakan serta menjadi penanggung jawab utama di bidang pemerintahan pembangunan kemasyarakatan dalam rangka menyelenggarakan unsur pemerintahan umum termasuk membina kehidupan masyarakat dan ekonomi desa, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan mendamaikan perselisihan masyarakat di desa di dalam dan di luar peradilan dan dapat menunjukkan kuasa hukumnya.

Dari pengertian – pengertian di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa yang di maksud dengan peran birokrasi pemerintah Desa adalah aktifitas atau kegiatan yang dilakukan oleh aparatur atau pejabat pemerintah yang di sebut birokrat yang ada di tingkat desa dalam proses penyelenggaraan kehidupan pemerintah desa.

¹² Tim Lapera, *Otonomi Pemberian Negara*, Lapera Pustaka Umum, Yogyakarta, September 2001, hal 92.

¹³ Mariun, *Asas-Asas Ilmu Pemerintahan*, Penerbit Fisip UGM, 1988, hal 3

¹⁴

Dengan dikeluarkannya Undang – undang no. 22 tahun 1999 tentang pemerintah di daerah, maka ketentuan – ketentuan yang di atur dalam undang – undang tersebut membawa implikasi terhadap peran yang dilakukan intitusi birokrasi di setiap level pemerintahan khusus intitusi birokrasi di tingkat desa.

Menurut Undang – Undang No.22 tahun 1999 kedudukan desa sebagai daerah otonom yang langsung di bawah pemerintahan Kabupaten dan tidak lagi berada di bawah Kecamatan, dan memberikan akses yang luas kepada pemerintah desa dalam melaksanakan peran sebagai aparatur negara yang berada di tingkat yang paling rendah yaitu :

- a. Menyelenggarakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan adat istiadat setempat yang di akui dalam sistem pemerintah nasional.
- b. Pemerintah desa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan dalam kehidupan masyarakat didesa
- c. Birokrasi desa dalam hal ini pemerintah desa mampu menyusun kebijakan dan program – program yang mencerminkan perwujudan aspirasi – aspirasi masyarakat setempat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Birokrasi desa dalam hal ini pemerintah desa harus mampu menciptakan penguatan terhadap penyelenggaraan otonomi daerah dengan cara

- e. Birokrasi desa dalam hal ini pemerintah desa harus mampu mendorong dan memfasilitasi masyarakat agar mampu untuk ikut berpartisipasi dalam proses pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Sedangkan Menurut Perda Kabupaten Sumbawa Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa. Dalam Peraturan Desa yang di maksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
2. Pemerintah Desa adalah kegiatan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
3. Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat desa.
4. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya.
5. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.

Permasalahan dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat desa masih sangat dirasakan di setiap tingkat pemerintahan dengan kadar yang berbeda-beda. Untuk itu pemerintah desa harus mampu mengidentifikasi setiap permasalahan di wilayahnya mengukur kadarnya menentukan prioritas sekaligus

mengikutsertakan masyarakat dalam rangka memecahkan setiap permasalahan dengan sumber daya yang tersedia. Selain itu pemerintah desa dalam rangka usaha menggerakkan masyarakatnya sangat diperlukan untuk mengoptimalkan hasil akhir dari program - program dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayahnya.

2. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan.

a. Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan epistemologis partisipasi diartikan sebagai mengambil bagian. Tentu saja ini menimbulkan banyak pemahaman yang berbeda tentang apa dan bagaimana serta dalam bentuk apa partisipasi masyarakat harus diberikan. Pada kenyataannya antara pihak – pihak yang berkepentingan dengan partisipasi dalam pembangunan. Di sini posisi masyarakat menjadi tidak begitu jelas, karena terjadi kebingungan antara partisipasi dan pengorbanan.

Dengan keberadaan kelompok masyarakat yang berpotensi bagi negara dapat dimanfaatkan sebagai sumber dari pelaksanaan suatu pembangunan, di antaranya pemanfaatan untuk kemampuan masyarakat untuk menyumbangkan ide – ide serta partisipasi dalam mewujudkan pembangunan.

Pengertian partisipasi menurut Bintoro C. Amijoyo adalah :

1. Keikutsertaan aktif atau berpartisipasi masyarakat berarti keterlibatan memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
2. Keterlibatan dalam memetik hasil pemanfaatan pembangunan.

Menurut Mubyarto partisipasi dalam arti luas partisipasi dalam pemerintah Desa adalah kesediaan untuk turut membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti harus mengorbankan kepentingan sendiri¹⁶.

Setelah memahami beberapa definisi yang diungkapkan para pakar, maka penyusun akan mencoba untuk mengungkapkan indikator partisipasi sebagaimana yang diungkapkan oleh Taliziduhu Ndraha, yakni sebagai berikut :

- a. Titik berat partisipasi adalah pada keterlibatan mental dan emosi. Kehadiran secara pribadi atau fisik adalah semata – mata didalam suatu kelompok keterlibatan tersebut bukanlah partisipasi
- b. Kesediaan memberikan kontribusi termasuk wujud kontribusi didalam pembangunan ada bermacam – macam misalnya : barang, uang, keterampilan, dan sebagainya.
- c. Kesediaan untuk bertanggung jawab.¹⁷

Dari beberapa pengertian tentang partisipasi di atas maka peneliti dapat menyimpulkan partisipasi masyarakat adalah partisipasi dalam suatu kegiatan pembangunan di mana keterlibatannya tersebut di lakukan secara bertahap, yaitu di mulai dari proses penentuan kebijakan, memikul tanggung jawab secara moril maupun materiil dan dalam menikmati hasil dan menfaat pembangunan itu sendiri.

¹⁵ Bintoro C. Amijoyo. "Perencanaan Pembangunan" CV. Haji Masagung. Jakarta. Tahun 1987. hal 26

¹⁶ Mubyarto. Prof.Dr. dan Santoso Kartodirjo. Prof. Dr. "Pembangunan Pedesaan di Indonesia", Liberty. Yogyakarta. 1988. hal 37

¹⁷ Taliziduhu Ndraha. "Indikator Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan".

b. Pengertian Pembangunan

Menurut Prof. Dr. Sondang P. Siagian yang di maksud dengan Pembangunan adalah sebagai berikut :

“Pembangunan di definisikan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang di lakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa “¹⁸

Sedangkan menurut Drs. I. Nyoman Barata mengatakan bahwa :

“Pembangunan itu tiada lain adalah suatu perubahan untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan pada norma – norma tertentu”

Dari kedua pendapat tersebut dapatlah di simpulkan bahwa pembangunan merupakan usaha perubahan yang di lakukan secara sadar dan berencana untuk modernisasi. Pembangunan merupakan perubahan sosial yang bertujuan untuk menaikkan taraf hidup kearah yang lebih baik dari pada keadaan sebelumnya.

Peningkatan Taraf hidup masyarakat secara fisik dapat di lihat dari pertumbuhan ekonomi yang merupakan cermin keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi. Sesuai dengan ketetapan MPR No.II/MPR/1983, di sebutkan bahwa :

“Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang materiil dan spirituil berdasarkan pancasila di dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia, yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai”¹⁹.

Dalam rangka pemerataan hasil – hasil pembangunan secara tegas, dalam konteks pembangunan perhatian khusus dari pemerintah menetapkan desa

¹⁸ Prof. Dr. Sondak P. Siagian, “*Administrasi Pembangunan*”. Gunung Agung, Jakarta, tahun 1970. hal 2-3

¹⁹ UUD, P4, GBHN, Sekretarian Negara Republik Indonesia.

mendapat prioritas pembangunan dengan di bentuknya lembaga kemasyarakatan seperti tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2003 tentang pedoman pembentukan lembaga permasyarakatan desa dan kelurahan. Dalam Bab.I Pasal 1 point 11 yaitu :

“Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang di bentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan yang merupakan mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Dan tujuan dari pembentukan lembaga kemasyarakatan adalah untuk menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan”.

Adapun tugas dan fungsi lembaga tersebut tertuang di dalam pasal 4 bagian kedua:

- a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif
- b. Mengerakan swadaya gotong royong masyarakat
- c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan
- d. Memelihara dan mengembangkan hasil – hasil pembangunan.

Mengingat penyebaran penduduk di Indonesia sebagian besar berdomisili di pedesaan, maka sangat tepat metode dalam pembangunan menggunakan pendekatan pembangunan berpusat pada manusia (people centre Development), dengan harapan agar masyarakat desa khususnya dapat menjalankan

Dari penjelasan tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan di atas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah :

“ Keterlibatan masyarakat secara mental, pikiran, emosi dan perasaan untuk memberikan sumbangan – sumbangan serta bertanggung jawab dalam suatu usaha rangkaian perubahan yang dilakukan oleh suatu bangsa atau negara kearah yang lebih baik, maju dan modern”.

a. Arti penting partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Proses pembangunan senantiasa menunjukkan gejala yang meningkat, maka peran birokrasi pemerintahan desa merupakan proses yang semakin besar dan komplekatif di mana kecendrungan arah baru dari proses pembangunan ini menekankan prinsip dari area bawah ke atas (BOTTOM UP), oleh karena itu birokrasi pemerintah harus mampu melihat kenyataan pembangunan jika peran yang di mainkan bisa berhasil yaitu dengan mengembangkan menejemen pembangunan sumber daya yang berwawasan lokal, dengan menggunakan model pembangunan di mana program – program dan kebijakannya berasal dari bawah yakni melihat sampai di mana peran serta masyarakat²⁰.

Kebijakan pelaksanaan otonom dan pembangunan di desa tidak terlepas dari partisipasi aktif masyarakat, di mana masyarakat sebagai kesatuan sistem maupun individu merupakan bagian integral dari sistem pemerintah desa²¹.

²⁰ Miftah Toha. *“Beberapa Aspek Kebijakan Birokrasi”*. MW, Mandala. Yogyakarta. Tahun 1991.

Dengan demikian jelas bahwa untuk mencapai suatu program pembangunan tidak bisa mengabaikan keikutsertaan masyarakat, di mana masyarakat harus di tempatkan pada kedudukan yang semestinya, artinya masyarakat tidak hanya sebagai obyek pembangunan tetapi sekaligus menjadi subyek pembangunan.

Keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat dapat berarti keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategis dan kebijakan dan juga keterlibatan dalam memikul hasil dan manfaat pembangunan secara adil.

Dari penjelasan di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam empat tahap yaitu :

1. Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan.
3. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil.
4. Partisipasi dalam evaluasi

Oleh karena itu partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan pada dasarnya menyangkut dua aspek yaitu :

1. Partisipasi sebagai hak. Artinya bahwa setiap warga negara mempunyai peluang yang sama untuk ikut serta guna memanfaatkan kesempatan yang timbul di dalam proses pembangunan dan ikut menikmati hasil-hasilnya

2. Partisipasi sebagai kewajiban. Artinya bahwa setiap warga negara berkewajiban untuk ikut serta memikul beban dan tanggung jawab serta menyukseskan pelaksanaan pembangunan.

Dari uraian di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa dalam suatu proses pembangunan masyarakat di tuntut untuk terlibat di dalamnya, baik itu kebijakan pembangunan yang datang dari pemerintah atau dari masyarakat itu sendiri, maka partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah peran nyata masyarakat dalam ikut serta memikul beban dan tanggung jawab.

b. Pemberdayaan masyarakat desa.

Pemberdayaan masyarakat yakni upaya untuk mengembangkan kemampuan, kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan agar masyarakat secara bertahap mampu membangun diri - sendiri dan lingkungannya secara mandiri.

Di dalam GBHN tahun 1999 pada arah kebijakan pembangunan daerah di nyatakan “ mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan “. Demikian juga dalam BAB IX PROPERNAS tentang pembangunan daerah dengan salah satu program pokoknya adalah meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang meliputi program penguatan organisasi masyarakat, program pemberdayaan masyarakat miskin dan

tentang pemerintah daerah, juga menegaskan tentang pentingnya pemberdayaan masyarakat dengan cara menumbuhkan prakarsa, kreativitas dan peran serta masyarakat.

Kebijakan mengenai pemberdayaan masyarakat dalam rangka otonomi pada saat ini sebenarnya di harapkan mampu menyelesaikan permasalahan yaitu :

1. Dengan adanya kerentanan kondisi masyarakat (Kemiskinan dan kesenjangan).
2. Kekurangberdayaan masyarakat ketika berhadapan dengan aparat pemerintah.
3. Kecendrungan memudarnya system nilai budaya. Kecendrungan kurang patuhan masyarakat terhadap ketentuan hukum yang berlaku.
4. Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam pembangunan.
5. Rendahnya tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Rendahnya akses masyarakat (Khususnya di desa – desa terisolir, terpencil, perbatasan dan kawasan kritis) terhadap pelayanan pemerintah.

Keberadaan permasalahan di atas sangat bervariasi kadarnya di setiap tingkat pemerintah dan tergantung pada kondisi alam dan sosial ekonomi setiap daerah.

diri, tidak bergantung dan lepas dari belenggu structural yang membuat hidup sengsara.

3. Peran birokrasi pemerintah desa dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Menurut Priyo Budi Santoso dalam buku Birokrasi Pemerintah Orde Baru edisi tahun 1993 menyebutkan bahwa peran birokrasi pemerintah dalam pembangunan adalah²³ :

- a. sebagai stabilisator dalam pembangunan artinya birokrasi pemerintah berfungsi untuk menciptakan dan memberikan situasi yang kondusif dalam masyarakat.
- b. Sebagai motivator dalam pembangunan artinya birokrasi pemerintah berfungsi sebagai penggerak dan pendorong dalam masyarakat untuk maju.
- c. Sebagai dinamisator dalam pembangunan artinya birokrasi pemerintah berfungsi untuk membentuk hubungan yang baik dalam proses pembangunan dengan masyarakat.

Perwujudan dari peran birokrasi pemerintah tersebut antara lain :

Birokrasi pemerintah desa selaku tokoh masyarakat memberi dorongan kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan demi kepentingannya.

Dan dengan pengetahuan politiknya dapat menjelaskan kepada masyarakat arti pentingnya partisipasi dalam pembangunan bagi mereka. Juga harus mampu mengerakkan masyarakat desa untuk aktif dalam pembangunan.

²³ Priyo Budi Santoso, Birokrasi Pemerintah Orde Baru, edisi tahun 1993, hal. 100.

Birokrasi pemerintah desa dapat berperan menyadarkan masyarakat tentang pentingnya mengikuti informasi pembangunan. Dan menanggapi berbagai kebijaksanaan pemerintah.

Birokrasi pemerintah juga dapat mengambil tindakan atau kebijaksanaan yang memungkinkan adanya perhatian atas tuntutan dan keinginan masyarakat yang pada gilirannya kebijakan akan di tetapkan sesuai dengan aspirasi bagi masyarakat setempat dalam menciptakan ketertiban dan membentuk stabilitas masyarakat yang mantap.

Kiat – kiat tersebut di atas barang kali dapat memotivasi birokrasi pemerintah desa untuk berperan secara baik dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang pada akhirnya masyarakat dapat mendukung kebijaksanaan yang di ambilnya.

Partisipasi masyarakat terhadap pembangunan yang di lakukan oleh birokrasi pemerintah desa adalah merupakan realisasi dari sikap masyarakat yang responsif terhadap kinerja aparatur birokrasi pemerintah desa, hal ini menunjukkan bahwa keikut sertaan dalam upaya pembangunan yang di lakukan oleh aparatur birokrasi pemerintah desa akan di pengaruhi oleh sikap masyarakat terhadap objek tersebut.

Peran birokrasi pemerintah terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan di pengaruhi persepsi masyarakat dan sikap masyarakat yang merupakan indikator dari partisipasi masyarakat. Peran yang di lakukan oleh birokrasi pemerintah desa seperti di sebut di atas pada dasarnya menuju pada

D. DEFINISI KONSEPTUAL

Untuk memberikan arah dan gambaran yang jelas terhadap pelaksanaan penelitian ini, maka berdasarkan kerangka teori yang telah di kemukakan pada bagian sebelumnya, dapat di simpulkan :

1. Peranan adalah Perilaku atau aktifitas yang di lakukan seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam rangka membina, membimbing, mengawasi dan mengembangkan pelaksanaan semua tugas - tugasnya di sertai dengan rasa penuh tanggung jawab sesuai aturan yang berlaku demi tercapainya tujuan yang di tentukannya.
2. Birokrasi adalah pejabat / orang-orang yang memerintah secara professional dan menjalankan pemerintahan.
3. Aparat desa adalah aparatur atau pejabat yang memiliki dan melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pembuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan yang berada di tingkat desa.
4. Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau kelompok dalam suatu kesatuan / organisasi dalam proses penentuan arah strategis dan kebijakan pembangunan yang di laksanakan pemerintah, keterlibatan memikul tanggung jawab dalam pelaksanaan pemerintah.
5. Partisipasi Masyarakat adalah kesedian untuk turut membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti harus

6. Pembangunan adalah perubahan sosial yang di lakukan secara sadar dan terencana untuk menuju kepada keadaan yang lebih baik untuk meningkatkan taraf hidup kearah yang lebih baik dari pada keadaan yang sebelumnya. Dalam hal ini pembangunan meliputi tahap – tahap pembangunan yaitu pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya khususnya pembangunan di desa.
7. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan adalah adanya peningkatan motivasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan yang di lakukan secara individual atau kolektif dalam berbagai bentuk atau dengan kata lain bahwa masyarakat bersifat partisipatif yang di wujudkan melalui peran nyata masyarakat untuk ikut memikul beban dan tanggung jawab dalam pembangunan.

E. DEFINISI OPERASIONAL.

Pada bagian definisi operasional, secara singkat dapat di jelaskan beberapa indikator penting yang terkait dengan variable – variable yang teliti.

1. Peran aparatur pemerintah desa dapat di lihat dengan :
 - a. Adanya penyebaran informasi kepada masyarakat.

c. Sebagai dinamisator dalam masyarakat

1. Intensitas Birokrasi Pemerintah Desa adalah membina kehidupan bermasyarakat (Kehendak untuk maju dan berkembang secara mandiri di berbagai bidang).
2. Intensitas pemberian informasi pembangunan kepada masyarakat.
3. Intensitas Birokrasi Pemerintah Desa membangun komunikasi masyarakat yang di harapkan dapat bermanfaat dan membawa pengaruh positif bagi masyarakat.
4. Intensitas Birokrasi dalam memberikan penyuluhan akan arti pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

2. Partisipasi Masyarakat.

Di samping sangat di butuhkan upaya, Birokrasi Pemerintah Desa berperan memajukan dan meningkatkan partisipasi masyarakat setidaknya masyarakat berusaha untuk secara mandiri. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat di lihat dengan indikator :

- a. Dalam tahap perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat dapat di lihat dengan indikator :

1. Intensitas dan kemampuan masyarakat dalam ikut serta secara aktif untuk memberikan masukan (ide, gagasan) tentang program –
program pembangunan desa

F. METODE PENELITIAN.

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk melakukan penelitian taraf ilmu pengetahuan ilmiah yang menyimpulkan fakta – fakta atau pun prinsip – prinsip untuk mencapai kepastian mengenai masalah²³.

1. Tujuan Penelitian.

Sebelum di laksanakan suatu penelitian, hendaknya di ketahui terlebih dahulu apa yang menjadi tujuan penelitian tersebut, sehingga penelitian dapat di laksanakan secara sistematis dan terarah. Yang menjadi tujuan penelitian secara umum adalah menguraikan apa yang menjadi sasaran yang akan dapat di laksanakannya penelitian.

Penelitian merupakan usaha menemukan dengan mempelajari hubungan gejala yang pasti pembuktian dan di capai kesimpulan dengan menggunakan metode tertentu.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah di kemukakan di atas maka tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran birokrasi pemerintah desa dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa thn 2004.

2. Kesadaran masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam proses pengambilan keputusan mengenai program – program atau kebijakan – kebijakan pemerintah desa.
3. Kemampuan masyarakat dalam melihat kebutuhan yang mendesak bagi kepentingannya.
4. Kemampuan masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan – kebijakan pemerintah desa

b. Dalam tahap pelaksanaan pembangunan partisipasi masyarakat dapat di lihat dengan indikator :

1. Keikut sertaan masyarakat secara aktif dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang dapat berwujud tenaga, uang, barang material, maupun informasi yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan.
2. Frekuensi dan keterlibatan masyarakat dalam mengikuti program – program pembangunan.
3. Keteguhan sikap dan dorongan dari masyarakat untuk memberikan dukungan terhadap peranan yang di lakukan oleh birokrasi pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
4. Keterlibatan secara aktif dalam mengontrol jalannya proses pelaksanaan pembangunan yang di lakukan oleh pemerintah desa.

- c. Dalam tahap pemanfaatan pembangunan partisipasi masyarakat dapat di lihat dengan indikator :
1. Kesadaran dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam memelihara, menjaga dan melestarikan hasil – hasil pembangunan.
 2. Kesadaran dan keterlibatan masyarakat untuk memikul beban dan tanggung jawab bersama dalam upaya peningkatan dan kemajuan pembangunan desanya.
 3. Kemampuan masyarakat untuk merasakan distribusi hasil – hasil pembangunan secara adil dan mampu memanfaatkan dengan baik dan bertanggung jawab.
- d. Dalam tahap evaluasi partisipasi masyarakat dapat di lihat dengan indikator.
1. Kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk memberikan kritikan atau masukan yang positif terhadap kesesuaian pelaksanaan program pembangunan dengan perencanaannya.
 2. Kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menanggapi kebijakan – kebijakan pemerintah desa.
 3. Kejujuran masyarakat dalam menanggapi kebijakan yang di buat oleh pemerintah desa.
 4. Intensitas dan kapasitas masyarakat yang positif untuk mendukung hasil pembangunan.

penciptaan motivasi masyarakat agar memiliki kesadaran untuk menentukan sikap dan perilaku yang bersifat mendukung pembangunan.

Motivasi dalam diri seseorang muncul karena manusia pada dasarnya memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan baik secara individu maupun sebagai makhluk sosial. Kebutuhan semacam itu menimbulkan dorongan pada diri manusia untuk selalu dapat memenuhinya, keinginan tersebut merupakan motivasi yang pada akhirnya mempengaruhi perilaku untuk bertindak.²²

Dari beberapa teori tentang munculnya motivasi seperti tersebut diatas dapat disimpulkan dalam dua model sikap masyarakat untuk berpartisipasi yaitu:

- a. Bahwa munculnya sikap masyarakat untuk berpartisipasi tidak terlepas dari peran yang di lakukan oleh birokrasi pemerintah desa yang bersifat mendorong atau memotivasi masyarakat
- b. Bahwa munculnya sikap masyarakat untuk berpartisipasi adalah merupakan kesadaran yang tumbuh dalam diri masyarakat itu sendiri.

Partisipasi di lihat dari motivasi dapat dibagi menjadi tiga yaitu :

- a. Berpartisipasi sekedar ikut-ikutan

Biasanya partisipasi yang di lakukan sekedar keterlibatan fisik saja, bukan mental emosional karena tidak tahu sama sekali kegiatan yang di laksanakan.

- b. Berpartisipasi karena perasaan takut.

Biasanya partisipasi yang di lakukan karena adanya unsur tekanan atau paksaan baik berupa ancaman, sangsi hukum, ataupun sangsi sosial.

²² Kartini Kartono, "Pemimpin dan Kepemimpinan". Rajawali. Tahun 1986. hal 70

c. Berpartisipasi karena kesadaran

Yaitu partisipasi yang sudah tumbuh karena adanya kesadaran dan perasaan tanggung jawab.

Partisipasi masyarakat dalam suatu proses pembangunan dapat di lihat dalam :

- a. Keikutsertaan dalam tahap perencanaan, artinya keterlibatan mental dan emosional, hadir secara fisik atau pribadi semata - mata dalam suatu kelompok, sehingga di dalamnya sudah termasuk partisipasi di dalam ikut andil dalam proses perencanaan.
- b. Keikutsertaan dalam tahap pelaksanaan, artinya kesediaan atau keikutsertaan dalam hal memberi kontribusi dalam pembangunan di berbagai bentuk (material dan imaterial) seperti uang, tenaga, pikiran, waktu, ketrampilan dan sebagainya sehingga dengan demikian sudah di anggap berpartisipasi.
- c. Keikutsertaan dalam tahap pemanfaatan artinya kesadaran atau keterlibatan untuk bertanggungjawab dalam hal menjaga, memelihara dan memanfaatkan hasil - hasil pembangunan
- d. Keikutsertaan dalam tahap evaluasi artinya keikutsertaan dan keterlibatan dalam hal mengevaluasi pelaksanaan program-program dengan rencana yang telah di tunjukkan dan mengevaluasi kesesuaian hasil dengan kebutuhan.

2. Untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa tahun 2004.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat membawa manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat akademik yakni untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teori mengenai partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
2. Manfaat dalam pengembangan pedesaan
 - Memberikan masukan bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
 - Memberi pegangan bagi birokrasi pemerinah desa atau lokal dalam menentukan langkah - langkah kebijaksanaan dan dalam perannya terhadap penigkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
 - Memberikan gambaran mengenai peranan birokrasi pemerintah desa terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga dapat di jadikan masukan dalam menentukan kebijakan dan program-program selanjutnya.

Manfaat praktis yaitu untuk meningkatkan peran serta birokrasi pemerintah desa atau lokal dalam menjalankan tugas dan kewajibannya yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di tingkat desa

3. Jenis Penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Oleh sebab itu peneliti hanya memfokuskan pada penggambaran dan pemecahan masalah yang di analisis secara kualitatif. Menurut Hadari Nawawi metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang di selidiki dengan menggambarkan keadaan subyek / obyek penelitian pada saat seseorang berdasar fakta – fakta yang nyata tampak atau sebagai mana adanya.²⁴

Ciri – ciri penelitian deskriptif²⁵ :1

- a. Memusatkan diri pada pemecahan masalah yang ada pada saat sekarang pada masalah – masalah aktual.
- b. Data yang di kumpulkan mula – mula di susun, di jelaskan kemudian di analisis.

4. Unit Analisa

Sesuai dengan permasalahan yang ada dan pokok permasalahan yang ada di dalam penelitian ini maka penyusun melakukan kegiatan yaitu menyusun unit analisisnya pada pihak terkait yang relevan dan tepat dengan pembahasan untuk di jadikan sumber data yang di perlukan. Dalam hal ini penyusun mewawancarai aparat desa dan beberapa orang yang di jadikan sample. Untuk itu penyusun mengambil sample 15 % dari jumlah populasi.

²⁴ Hadari Nawawi. "*Metode Penelitian Sosial*". Gajah Mada University Press. Yogyakarta. Tahun 1982. hal 67

²⁵

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri – cirinya akan di duga. Jadi populasi adalah jumlah sama individu yang ditentukan identitasnya untuk memperoleh data sesuai dengan masalah yang di teliti.²⁶

Sampling merupakan proses pemilihan sampel dari suatu kelompok besar (Populasi Penelitian) menjadi basis bagi pengestimasian atau prediksi suatu fakta, situasi atau hasil yang di anggap mewakili kelompok besar tersebut. Sampel merupakan sub kelompok dalam populasi penelitian.

Dari data yang ada, peneliti mengambil sampel dari masyarakat Dusun Pamulung dan Dusun Tanjung Pengamas tepatnya di Masyarakat Pantai Goa, yang berada di Desa Karang Dima, kecamatan labuhan badas untuk di jadikan sebagai perbandingan, yaitu :

1. Aparat Pemerintah Desa Karang Dima dalam Perannya sebagai peningkatan partisipasi Masyarakat.
2. Masyarakat Desa Karang Dima

Berkaitan dengan pengambilan sampel, Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa :
”Apabila obyek kurang dari 100 orang maka lebih baik diambil semua, sehingga merupakan penelitian populasi. Sedangkan jika jumlah obyeknya besar maka dapat diambil antara 10 - 15% atau 20 – 25% atau lebih”²⁷.

Dalam penelitian ini sampel yang di ambil adalah antara 10 – 15 % dari populasi yaitu 15 % dari jumlah masyarakat yang sudah berumur di atas 17 tahun. Hal ini karena terbatasnya tenaga, waktu dan biaya yang di miliki oleh peneliti.

²⁶ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, “*Metode Penelitian Survei*”, PT. Pustaka LP3ES, Jakarta, 1989, hal 108

²⁷ Suharsimi Arikunto, “*Metode Penelitian*”, Rineka Cendekia, Jakarta, 1992

Sehingga sampel yang di ambil di harapkan sudah dapat mewakili populasi yang ada.

5. Data yang dibutuhkan.

A. Data Primer

Yaitu data langsung dari tangan pertama yang menyangkut pendapat dari responden tentang Variabel penelitian, yang diperoleh dari jawaban hasil interview atau observasi dari aparat Desa Karang Dima dan Masyarakat.

B. Data Sekunder

Yaitu data yang di ikuti dari sumber lain, sehingga tidak bersifat langsung autentik karena sudah di peroleh dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya. Melihat dari uraian, maka yang akan di jadikan data sekunder dari penelitian ini adalah arsip – arsip, buku atau dokumen – dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

6. Lokasi Penelitian.

Penelitian di lakukan di Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Sumbawa Besar, NTB tahun 2004.

7. Teknik Pengumpulan Data.

a. Pengamatan (Obsevasi)

Teknik yang di pakai untuk pengumpulan data adalah Pengamatan (Observasi). Teknik ini di gunakan dengan cara melakukan pengamatan terhadap

gejala – gejala yang terjadi, guna memperoleh data dan gambaran yang sesungguhnya dalam penelitian.

Menurut Sutrisno Hadi observasi adalah :

“Pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena – fenomena yang diselidiki.²⁸”

Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap peran dan cara pelaksanaan kerja aparat pemerintah Desa Karang Dima dalam melayani masyarakat dan memprogram segala bentuk kebijakan dan pembangunan yang akan di laksanakan di desa serta bagaimana tanggapan dari masyarakat terhadap hasil kerja aparat pemerintah dan bagaimana penyelesaian - penyelesaian masalah – masalah yang timbul dalam masyarakat ketika di laksanakan program pembangunan.

b. Wawancara (Interview)

Metode ini di gunakan dengan cara melakukan percakapan oleh dua pihak. Pertanyaan di ajukan oleh pewawancara dan yang menjawab atas peranyaan itu adalah yang di wawancarai, atau dengan kata lain peneliti mengajukan pertanyaan dan responden memberian jawaban.

Menurut Sutrisno Hadi, Interview adalah :

“Metode pengumpulan data dengan jalan Tanya – jawab sefihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan.²⁹”

²⁸ Sutrisno Hadi “*Metodologi Penelitian*” Edisi 2 Penerbit Andi, Yogyakarta, 2000, hal 136

Dan jenis interviuw yang di gunakan adalah Interviuw Terpimpin / Guided Interview. Dalam interview terpimpin ada pedoman yang memimpin jalannya Tanya – jawab kesatu arah yang telah di tetapkan dengan tegas. Dalam interview terpimpin / guided interview kedua belah pihak memegang peranan yang berbeda dalam permainan Tanya – jawab, maka sudah semestinya jika ada tuntutan – tuntutan tertentu terhadap penginterview dalam memainkan perannya, maka tuntutan itu adalah kemahiran dan ketangkasan – ketangkasan tertentu dalam bidang, seperti bidang teknik cara mengajukan pertanyaan – pertanyaan, pencatatan, pemeliharaan hubungan persahabatan, paraphrasing, reformulering dan penilaian terhadap situasi dan jawaban³⁰.

Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan pada aparat pemerintah desa dan pada masyarakat tentang :

1. Peranan yang di lakukan oleh aparat pemerintah desa dalam rangka pembangunan partisipasi masyarakat.
2. Pada masyarakat, ingin mengetahui bagaimana motivasi dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

c. Teknik Dokumentasi/disebut sebagai Penelitian Kepustakaan (Library Research).

Teknik penelitian kepustakaan yaitu mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip – arsip dan termasuk juga buku – buku

³⁰ *Ibid, hal 205*

tentang pendapat, teori atau Koran, majalah dan lain – lainnya yang berhubungan dengan masalah yang ada dalam penyelidikan.³¹

8. Teknik Analisa Data.

Teknik analisa yang di gunakan yakni analisa data secara kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata - kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati. Dengan pemahaman seperti itu, maka penelitian kualitatif di arahkan untuk memahami sebuah fenomena secara holistic dan tidak mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.³²

Oleh karena itu pada bagian ini penyusun dapat menjelaskan Peran Birokrasi Pemerintah Desa terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan. Pemerintah desa setidaknya bisa memberikan pandangan kepada masyarakat untuk dapat memahami politik terutama dalam berpartisipasi dalam pembangunan sebagai suatu kegiatan yang mempengaruhi sikap, tingkah laku dan tindakan politik masyarakat.

Ini berarti bahwa masyarakat harus di beri motivasi oleh birokrasi pemerintah desa untuk berpartisipasi di dalam segala hal termasuk di dalam berpolitik dalam pembangunan. Untuk itu, masyarakat harus lebih di pandang sebagai subyek pembangunan bukan hanya sebagai obyek pembangunan.

³¹ Nawawi, Hadari, "*Metodologi Penelitian Bidang Sosial*", Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1983, hal 80

³² Rahmawati, Dian Eka "*Metode Penelitian Kualitatif*", Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan,

Sebagai subyek pembangunan, masyarakat bisa di libatkan dalam pembuatan keputusan, sehingga berbagai kebijakan akan lebih sesuai dengan kebutuhan – kebutuhan milik masyarakat yang mendesak (substansial). Dengan demikian birokrasi pemerintah desa harus sungguh – sungguh menjalankan tugas dan kewajiban sebagai stabilisator, motivator dan dinamisator dalam kehidupan politik masyarakat desa dan perannya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.